

## **Identifikasi Sektor dan Komoditi Ekonomi di Papua Barat Daya**

### *Identification of Key Sectors and Commodities Economic in Papua Barat Daya*

**Victor Rumere**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Papua, Manokwari  
Jalan Gunung Salju Amban, Nomor 01, Manokwari, Papua Barat  
Email koresponden: victor.rumere@gmail.com

Diterima tanggal : 5 Mei 2024 ; Disetujui tanggal : 22 Juni 2024

#### **ABSTRACT**

*A New Autonomous Region requires mapping regional economic potential to develop economic sector strategies. The purpose of the study is to identify the potential sectors and commodities in the regencies and municipalities of Papua Barat Daya that have the potential to become leading sectors and commodities in the region. The main data sources used were Gross Regional Domestic Product and socioeconomic statistics at the district level in Papua Barat Daya between 2018-2022. The Location Quotient approach was used to analyze the data and determine the base economic sector. The leading economic commodity was determined by comparing the average score value with the cut-off point value. The results of this study comprise two findings. First, the agricultural sector and its subsectors are the basic sectors in Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrau, and Maybrat. Meanwhile, the mining and processing industry is prominent in Sorong. In Sorong City, the basic business sectors are services and trade. Second, the study results showed that service businesses and micro, small, and medium industries have potential in Sorong City. Capture fisheries business in Sorong, South Sorong, Raja Ampat, and Tambrau. While processed wood and petroleum businesses are superior commodities in Sorong, the tourism industry is exceptional in Raja Ampat, animal husbandry commodities are superior in Tambrau, and horticultural crop commodities are superior in Maybrat.*

**Keywords:** *Leading Commodity, Leading Sector, New Autonomous Region, Papua Barat Daya.*

#### **ABSTRAK**

Daerah Otonomi Baru membutuhkan pemetaan potensi ekonomi daerah untuk pengembangan sektor strategis. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi sektor dan komoditi ekonomi potensial kabupaten/kota di Papua Barat Daya, yang berpotensi untuk dijadikan sektor dan komoditi basis unggulan daerah. Data utama penelitian yaitu Produk Domestik Regional Bruto, dan statistik sosial ekonomi tingkat kabupaten/kota di Papua Barat Daya tahun 2018-2022. Data dianalisis menggunakan pendekatan *Location Quotient* untuk menentukan sektor ekonomi basis. Sementara penentuan komoditi ekonomi unggulan dilakukan dengan membandingkan rerata nilai skor dengan nilai *cut-off point*. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan penting, pertama sektor pertanian dan subsektornya

merupakan sektor basis di Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat. Sementara pertambangan dan industri pengolahan unggul di Sorong. Sektor lapangan usaha basis di Kota Sorong yaitu jasa dan perdagangan. Temuan kedua, hasil studi juga menunjukkan bahwa usaha jasa dan industri mikro, kecil, dan menengah berpotensi di Kota Sorong. Usaha perikanan tangkap di Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Tambrauw. Sementara usaha kayu olahan dan minyak bumi merupakan komoditi unggulan di Sorong, usaha industri pariwisata unggul di Raja Ampat, komoditi usaha peternakan hewan unggul di Tambrauw, dan komoditi tanaman hortikultura unggul di Maybrat.

**Kata Kunci:** Komoditi Unggulan, Sektor Unggulan, Daerah Otonomi Baru, Papua Barat Daya.

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari seluruh kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat diharapkan selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seiring dengan proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, keseriusan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya menjadi suatu keharusan (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2011).

Satu dari berbagai upaya yang umumnya dilakukan di era desentralisasi yaitu melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pembentukan DOB oleh Pemerintah, bertujuan untuk pemerataan sosial, dan percepatan pembangunan, serta meningkatkan layanan publik (Nashrullah & Lohalo, 2022). Pendekatan DOB dipandang menjadi penting, dikarenakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi (Rumere et al., 2022). Pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi di wilayah DOB dapat terlaksana dengan optimal, manakala potensi ekonomi daerah dan potret wilayah terdokumentasi dengan baik. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian terhadap potensi sektor dan komoditi ekonomi daerah di wilayah DOB, sebagai sektor basis yang memiliki daya saing untuk dikembangkan.

Sebagai misal, Provinsi Papua Barat Daya (PBD) merupakan wilayah DOB yang dibentuk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2022,

dimana berdasarkan Pasal 6 Ibu Kota Provinsi PBD berkedudukan di Kota Sorong (Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, 2022). Sebagai DOB, Provinsi PBD berkewajiban melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan adalah membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang baik dan tepat. Lebih lanjut, guna meminimalisir potensi adanya *bias* terhadap perencanaan pembangunan ekonomi di PBD, maka dokumentasi potensi sektor dan komoditi ekonomi daerah perlu dilakukan dengan tepat dan akurat. Konsekuensi dari ketepatan dan akurasi hasil dokumentasi terkait potensi sektor dan komoditi ekonomi daerah, membantu penyelenggara layanan publik (Pemerintah Daerah) menyusun program, strategis, dan arah kebijakan daerah di PBD utamanya dalam bidang ekonomi.

Penelitian sejenis terdahulu, umumnya telah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor strategis dan potensial di wilayah Papua (De Fretes, 2017; Kurniawati & Cahyono, 2022; Maspaitella & Parinussa, 2021; Rumere & Suruan, 2023). Namun, informasi terkait sektor dan komoditi unggulan yang berpotensi kembangkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di wilayah DOB, melalui optimalisasi sumber daya ekonomi menuju Papua Produktif yang merupakan salah satu dari tiga sasaran utama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041, belum tersedia dengan baik. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan melengkapi penelitian sejenis terdahulu terutama penyediaan data dan informasi sektor dan komoditi unggulan daerah, di wilayah DOB khususnya di Provinsi PBD. Luaran penelitian yaitu teridentifikasi sektor dan komoditi unggulan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi PBD, yang memiliki prospek di masa depan, dan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, luaran penelitian juga menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis sektor dan /atau komoditi yang memiliki daya saing.

## **METODE PENELITIAN**

Identifikasi sektor dan komoditi unggulan daerah dilakukan di Provinsi PBD, yang mencakup data sektoral kabupaten/kota di wilayah PBD. Cakupan wilayah penelitian yaitu di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat.

Data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui hasil-hasil kajian yang telah dipublikasi oleh lembaga pemerintah dan /atau swasta, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi PBD periode 2018-2022, statistik kabupaten/kota di PBD, dan jenis data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara lapang kepada informan kunci yang berkompeten, guna memperkuat hasil analisis data sekunder.

Data dianalisis menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ berguna untuk mengidentifikasi sektor basis suatu wilayah (Sausan et al., 2022). Analisis LQ juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan yang merupakan *leading sector* di suatu wilayah. Persamaan LQ ditulis sebagai berikut:

Formula:

$$LQ = \frac{X_{ir}}{X_r} \bigg/ \frac{X_{in}}{X_n} \quad (1)$$

Dimana:  $X_{ir}$  merupakan jumlah sektor  $i$  di tingkat daerah,  $X_r$  adalah jumlah seluruh sektor di tingkat daerah,  $X_{in}$  merepresentase sektor  $i$  di tingkat provinsi, dan  $X_n$  merupakan jumlah seluruh sektor di tingkat provinsi. Dengan demikian, LQ digunakan untuk membandingkan peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah, dengan peranan sektor sejenis pada lingkup yang lebih luas di atasnya. Kriteria pengukuran yang kemungkinan terjadi yaitu (a) jika  $LQ > 1$  maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi sektor di kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi, (b) jika  $LQ = 1$  maka tingkat spesialisasi sektor di kabupaten/kota sama dengan di tingkat provinsi, dimana produksi komoditi yang bersangkutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat, dan (c) jika  $LQ < 1$  maka sektor tersebut dikategorikan sektor non

basis, artinya tingkat spesialisasi sektor pada tingkat kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi (Christofakis et al., 2019; Han & Song, 2020).

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah penentuan sektor lapangan usaha potensial, yaitu menentukan komoditi unggulan daerah. Komoditi unggulan adalah komoditi yang diusahakan berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan ekosistem lingkungan usaha, guna meningkatkan nilai tambah dan memiliki daya ungkit terhadap sektor lainnya (Volsi et al., 2019). Umumnya, suatu komoditi dikategorikan unggul jika memiliki karakteristik (1) komoditi dapat diproduksi secara terus menerus pada tingkat produktivitas dan kualitas yang baik, (2) dapat diserap oleh pasar dalam jumlah besar, dan (3) berkelanjutan dan pada tingkat harga yang wajar (Yuliansyah et al., 2023). Namun, karakteristik seperti dimaksud diatas berpotensi memunculkan kriteria/pandangan yang beragam (Ningsih et al., 2020).

Penetapan komoditi unggulan yang dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, umumnya merujuk pada potensi daerah (Bernardin & Pertiwi, 2020). Namun demikian, tidak terlalu jelas bagaimana sebenarnya suatu komoditi ditetapkan menjadi komoditi unggulan daerah (Souza et al., 2021). Dampaknya, komoditi unggulan yang ditetapkan berpotensi *bias* dan tidak fokus. Meminimalisir adanya potensi *bias*, maka penentuan komoditi unggulan dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa aspek seperti tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, kemudahan akses untuk modal usaha, sarana dan prasarana produksi, teknologi yang digunakan, aspek sosial budaya dan kearifan lokal, kemampuan manajemen usaha, jangkauan pemasaran, stabilitas harga, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Kriteria menentukan komoditi unggulan dalam penelitian ini merujuk pada Handayani dan Haryatiningsih, (2022), yang ditentukan melalui dua tahapan yaitu pertama, menghitung rerata skor dari respon informan kunci terhadap sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang telah terisi. Nilai rerata skor diperoleh dengan formula:

$$r = \frac{\sum \text{Skor}}{n} \quad (2)$$

Dimana:  $r$  menunjukkan nilai rerata skor,  $\sum$  skor merupakan penjumlahan terhadap skor yang telah diperoleh dari respon informan terhadap pertanyaan yang diajukan, dan  $n$  adalah jumlah pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh respon dari informan kunci. Tahap kedua, yaitu menghitung nilai *cut off point*. Nilai *cut off point* yang diperoleh digunakan sebagai batas toleransi, untuk mengkategorikan suatu komoditi dinyatakan unggul. Nilai *cut off point* dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Cut off Point} = \frac{(\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah})}{2} \quad (3)$$

Nilai rerata skor dan nilai *cut off point* setelah diperoleh, dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu membandingkan nilai rerata skor dengan nilai *cut off point* untuk menetapkan komoditi unggul. Jika nilai rerata skor  $>$  nilai *cut off point*, maka komoditi dikategorikan unggul. Sebaliknya, jika nilai rerata yang diperoleh  $<$  nilai *cut off point*, maka komoditi dikategorikan tidak memiliki keunggulan.

## HASIL DAN DISKUSI

### *Sektor Basis Ekonomi Kabupaten/Kota di PBD*

Analisis sektor lapangan usaha unggulan dan potensial daerah di PBD dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dengan menggunakan data terpilah PDRB berdasarkan harga berlaku. Penggunaan data PDRB berdasarkan harga berlaku dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah (Rumere & Suruan, 2023). Dengan demikian, hasil analisis data terpilah diharapkan dapat memberikan informasi awal berkenaan dengan sektor lapangan usaha, yang dapat dijadikan sebagai sektor basis dan berpotensi untuk dikembangkan di daerah.

Di Kota Sorong, hasil perhitungan LQ terhadap tujuh belas sektor lapangan usaha, teridentifikasi sebanyak 13 sektor lapangan usaha yang memiliki nilai LQ  $>$  1. Sektor lapangan usaha dimaksud yaitu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan,

jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sebaran sektor lapangan usaha unggulan kabupaten/kota di PBD, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rerata Nilai LQ Sektoral Kabupaten/Kota di PBD Tahun 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota					
	Kota Sorong	Sorong	Sor. Selatan	Raja Ampat	Tamb-rawu	May-brat
Pertanian, Kehut. & Perikanan	0,69	0,81	1,97	2,20	2,50	2,29
Pertambangan & Penggalian	0,13	1,68	0,27	3,56	0,21	0,10
Industri Pengolahan	0,29	2,53	0,08	0,05	0,04	0,02
Peng. Listrik dan Gas	1,53	0,50	0,97	0,22	1,49	0,47
Air, Sampah, Limbah Daur Ulang	1,71	0,42	0,46	0,10	0,21	0,28
Konstruksi	1,18	0,77	1,41	0,69	1,08	0,85
Perdag, Reparasi Mobil & Motor	1,65	0,31	0,91	0,40	0,10	0,53
Transportasi & Pergudangan	1,88	0,16	0,39	0,15	0,31	0,38
Akomodasi Makan & Minum	1,70	0,30	0,49	0,53	0,18	0,25
Informasi & Komunikasi	1,93	0,14	0,39	0,08	0,05	0,08
Jasa Keuangan & Asuransi	1,74	0,29	0,47	0,24	0,16	0,87
Real Estate	1,75	0,27	0,43	0,39	0,71	0,26
Jasa Perusahaan	1,75	0,39	0,30	0,13	0,05	0,19
Admin. Pemerintahan, dll	0,93	0,67	1,75	1,38	2,87	3,17
Jasa Pendidikan	1,47	0,49	1,42	0,26	1,33	0,81
Jasa Kesehatan dan Sosial	1,53	0,44	1,42	0,21	0,67	0,57
Jasa Lainnya	1,80	0,19	0,42	0,51	0,07	0,13

Sumber: Hasil pemetaan peneliti (2023)

Periode yang sama, data terpilah juga digunakan untuk menganalisis sektor basis dan potensial di Kabupaten Sorong. Hasil perhitungan LQ menunjukkan sebanyak 2 sektor yang memiliki nilai LQ > 1. Kedua sektor lapangan usaha dimaksud yaitu pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Di Kabupaten Sorong Selatan, hasil perhitungan LQ terhadap ke tujuh belas sektor lapangan usaha menunjukkan bahwa, terdapat 5 sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *leading sector* diantaranya pertanian, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Begitu pula di Kabupaten Raja Ampat, hasil kalkulasi LQ menunjukan bahwa, terdapat 3 sektor lapangan usaha unggulan yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Data terpilah PDRB berdasarkan harga berlaku, juga digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis di Kabupaten Tambrau. Hasil

perhitungan LQ menunjukkan bahwa, terdapat 5 sektor lapangan usaha yang merupakan sektor basis dan potensial untuk dijadikan instrumen penggerak ekonomi di Kabupaten Tambrauw. Ke empat sektor lapangan usaha tersebut adalah pertanian dan subsektornya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, dan jasa pendidikan. Sementara di Kabupaten Maybrat, hasil kalkulasi dengan menggunakan pendekatan LQ menunjukkan bahwa, terdapat 2 sektor lapangan usaha yang terkategori unggul yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

### ***Komoditi Unggulan Ekonomi Daerah di PBD***

Hasil identifikasi komoditi ekonomi unggulan kabupaten/kota di Provinsi PBD menunjukkan bahwa, terdapat sembilan komoditi unggulan yang memiliki daya saing dan berpotensi dikembangkan. Kesembilan komoditi dimaksud yaitu (1) jasa dan industri mikro dan kecil, (2) perikanan tangkap, (3) kayu olahan, (4) minyak bumi, (5) perkebunan sawit, (6) tanaman hortikultura, (7) tanaman pangan, (8) peternakan hewan, dan (9) pariwisata.

Di Kota Sorong, teridentifikasi komoditi unggulan yaitu aktivitas lapangan usaha jasa perikanan dan industri/usaha mikro dan kecil. Letak Kota Sorong yang strategis dan menjadi gerbang masuk aktivitas niaga, yang menjadikan Kota Sorong sebagai pusat aktivitas industri, jasa, dan pusat transaksi barang dan jasa di Provinsi PBD. Kota Sorong, juga tidak hanya berperan sebagai penghubung yang mempertemukan arus transportasi barang dan jasa, tetapi juga berperan sebagai pusat transaksi jual-beli hasil perikanan tangkap. Sementara di Kabupaten Sorong, dari tiga komoditi yang teridentifikasi, kayu olahan dan minyak bumi dikategorikan unggul, dikarenakan nilai rerata dari komoditi kayu olahan lebih tinggi dari nilai *cut off point*. Begitu pula dengan nilai rerata yang diperoleh komoditi minyak bumi lebih tinggi dari nilai *cut off point* yang dihasilkan. Sebaliknya, komoditi perkebunan sawit, belum dikategorikan unggul dikarenakan nilai rerata skor lebih rendah dari nilai *cut off point*. Komoditi unggulan sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Komoditi Ekonomi Unggulan Daerah di Provinsi PBD

Kab/Kota	Komoditi	Rerata Skor	Nilai Cut off Point	Ket.
Kota Sorong	Jasa, Industri Mikro & Kecil	3,27	3,00	Unggul
	Jasa Perikanan Tangkap	3,09	3,00	Unggul
Kab. Sorong	Kayu Olahan	3,09	3,00	Unggul
	Minyak Bumi	3,27	3,00	Unggul
	Perkebunan Sawit	2,82	3,00	Tidak Unggul
Kab. Sorong Selatan	Perikanan Tangkap	3,00	3,00	Unggul
	Tanaman Pangan	2,18	3,00	Tidak Unggul
	Tanaman Hortikultura	2,27	3,00	Tidak Unggul
Kab. Raja Ampat	Pariwisata	3,73	3,50	Unggul
	Perikanan Tangkap	3,00	3,00	Unggul
	Pertambangan	2,45	3,00	Tidak Unggul
Kab. Tambrauw	Peternakan Hewan	2,55	2,50	Unggul
	Perikanan Tangkap	3,00	3,00	Unggul
	Tanaman Pangan	2,64	3,00	Tidak Unggul
Kab. Maybrat	Tanaman Hortikultura	2,64	3,00	Tidak Unggul
	Perikanan Air Tawar	2,55	3,00	Tidak Unggul
	Tanaman Pangan	3,00	3,00	Unggul
	Tanaman Hortikultura	3,09	3,00	Unggul

Sumber: Hasil perhitungan peneliti (2023)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa, komoditi perikanan tangkap unggul di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw. Di Kabupaten Sorong Selatan, komoditi perikanan tangkap didominasi oleh perikanan darat. Sementara di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrauw, aktivitas perikanan tangkap sebagian besar dilakukan terhadap hasil tangkapan perikanan laut. Selain komoditi perikanan tangkap, di Kabupaten Raja Ampat, aktivitas usaha pariwisata tergolong kategori unggul. Begitu pula dengan komoditi peternakan hewan terkategori unggul di Kabupaten Tambrauw, sementara di Kabupaten Maybrat komoditi tanaman hortikultura dan tanaman pangan (kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu), dikategorikan unggul dikarenakan nilai rerata skor lebih tinggi dari nilai *cut-off point*.

### ***Ragam Permasalahan Pengembangan Komoditi Ekonomi***

Sektor lapangan usaha dan komoditi unggulan daerah kabupaten/kota di Provinsi PBD sebagaimana telah teridentifikasi, juga mengalami tantangan dan /atau kendala. Kendala dan /atau tantangan ini menjadi determinan penting penyebab sektor lapangan usaha dan komoditi unggulan kabupaten/kota di PBD, belum memberikan sumbangan optimal terhadap kegiatan ekonomi kabupaten/kota di PBD. Tantangan pengembangan sektor dan komoditi unggulan di PBD mencakup aspek (1) akses terhadap modal usaha, (2) minimnya sarana dan prasarana pendukung, (3) budaya kerja pelaku usaha, (4) akses terhadap pasar, (5) pengembangan aksi kolektif yang masih minim, (6) tingginya biaya angkut, (7) banyaknya industri yang ilegal, dan (8) peralatan dan teknologi yang digunakan. Kendala pengembangan komoditi unggulan daerah kabupaten/kota di Provinsi PBD, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ragam Permasalahan Pengembangan Komoditi Ekonomi

Komoditi Unggulan	Lokasi	Tantangan
Jasa dan Industri Mikro & Kecil	Kota Sorong	Panjangnya rantai distribusi barang/jasa
		Kualitas dan kuantitas produksi komoditi lokal yang belum mendapatkan pasar potensial
		Belum adanya jaminan ketersediaan barang/jasa dalam jumlah yang cukup, serta harga yang terjangkau
		Belum adanya pengembangan sentra industri yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah
		Lemahnya akses modal bagi pelaku usaha
Perikanan Tangkap	Kab. Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw	Lemahnya kualitas SDM dalam pengelolaan produk dan peningkatan kualitas/mutu
		Produksi perikanan tangkap dipasarkan dalam bentuk konvensional
		Rendahnya mutu & bahan baku industri perikanan tangkap
		Terbatasnya penerapan teknologi tepat guna, untuk pengembangan produk dengan daya saing tinggi
		Kesulitan pengembangan budidaya perikanan tangkap
Industri Kayu Olahan	Kab. Sorong	Infrastruktur perikanan tangkap belum memadai
		Kewenangan PEMDA untuk mengelola kehutanan di daerah, telah dialihkan ke Pusat
		Kebaradaan hutan yang terancam akibat perambahan hutan, kerusakan hutan, dan pelepasan kawasan hutan untuk pemekaran wilayah
		Peran serta masyarakat belum optimal
		Potensi dan kerusakan hutan yang belum optimal teridentifikasi dengan baik

Komoditi Unggulan	Lokasi	Tantangan
		Banyaknya industri kayu olahan yang ilegal Umumnya bea ekspor yang dibebankan kepada pengusaha kayu, dinilai tidak transparan
Minyak Bumi	Kab. Sorong	Umumnya sumur minyak di wilayah Sorong terkategori tua Kendala izin konsesi perusahaan di wilayah adat Tenaga kerja lokal, memiliki kompetensi terbatas untuk akses ke perusahaan Permintaan minyak dunia terus mengalami penurunan dikarenakan kompetitor semakin banyak
Pariwisata	Raja Ampat	Belum optimalnya upaya promosi potensi pariwisata Kegiatan pariwisata umumnya terfokus pada satu titik, seperti di Raja Ampat Regulasi lokal yang beragam tentang retribusi Sarana dan prasarana pendukung aktivitas pariwisata
Peternakan Hewan	Tambrau	Usaha peternakan umumnya masih dilakukan dengan insentif (konvensional) Harga pakan ternak relatif mahal di tingkat peternak Bahan baku sumber pakan, umumnya sulit diperoleh Belum tersedianya rumah potong hewan yang memadai Jumlah dokter hewan relatif terbatas
Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan	Maybrat	Produksi dan produktivitas komoditi tanaman hortikultura dan tanaman pangan masih relatif rendah Pengembangan varietas tanaman hortikultura dan pangan unggulan lokal, belum dilakukan dengan baik Keterbatasan transportasi hasil produksi tanaman hortikultura dan tanaman pangan Keterbatasan akses pasar produksi hasil tanaman hortikultura dan tanaman pangan Keterbatasan petani mengakses pupuk bersubsidi Alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak bisa dikendalikan Kapasitas SDM petani relatif masih rendah Jumlah petugas penyuluh pertanian relatif kurang

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

## SIMPULAN

Tujuan utama dilakukannya penelitian yaitu teridentifikasi sektor dan komoditi unggulan daerah kabupaten/kota di PBD. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha pertanian dan subsektornya unggul di Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrau, dan Maybrat. Sementara sektor lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan unggul di Sorong. Di Kota Sorong,

sektor lapangan usaha yang unggul yaitu jasa dan perdagangan. Kedua, hasil studi juga menunjukkan bahwa komoditi unggulan daerah di Kota Sorong yaitu usaha jasa dan industri mikro, kecil, dan menengah. Komoditi perikanan tangkap unggul di Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Tambrau. Usaha kayu olahan dan minyak bumi merupakan komoditi unggulan di Sorong, usaha industri pariwisata unggul di Raja Ampat, komoditi usaha peternakan hewan unggul di Tambrau, dan komoditi tanaman hortikultura di Maybrat.

Potensi sektor dan komoditi unggulan daerah di PBD sebagaimana telah teridentifikasi, perlu diperhatikan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan *stakeholders* di PBD, sebagai motor penggerak perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, perencanaan pembangunan bidang ekonomi di PBD dapat diarahkan pada (1) pengembangan dan penciptaan tenaga kerja profesional melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja di daerah, (2) pengembangan aksesibilitas kawasan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi daerah untuk menghubungkan pasar dengan petani, dan (3) membuka peluang pelibatan sektor swasta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Christofakis, M., Gaki, E., & Lagos, D. (2019). The Impact of the Economic Crisis on Regional Disparities and the Allocation of Economic Branches in Greek Regions. *Bulletin of Geography*, 44(44). <https://doi.org/10.2478/bog-2019-0011>
- De Fretes, P. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi (Shift Share), dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.384>
- de Oliveira Souza, C., Vitorino Guimarães, G., da Cruz Saldanha, L. E., Almeida Corrêa do Nascimento, F., Floriano dos Santos, T., & Vieira da Silva, M. A. (2021). Analysis of Job Accessibility Promoted by Ride-Hailing Services: A Proposed Method. *Journal of Transport Geography*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103048>
- Devi Rahayu Handayani, & Haryatiningsih, R. (2022). Identifikasi Potensi

- Ekonomi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2017 - 2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4624>
- Han, Z., & Song, W. (2020). Identification and Geographic Distribution of Accommodation and Catering Centers. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/ijgi9090546>
- Kurniawati, A. D., & Cahyono, H. (2022). Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Analisis Sektor Unggulan di Papua. *Independent: Journal of Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p49-63>
- Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal Decentralization and Government Quality in the OECD. *Economics Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.02.019>
- Maspaitella, M., & Parinussa, S. M. (2021). Applying Location Quotient and Shift-Share Analysis in Determining Leading Sectors in Teluk Bintuni Regency. *Journal of Developing Economies*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jde.v6i1.22182>
- Nashrullah, J., & Lohalo, G. O. (2022). The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6901>
- Ningsih, D. S., Haryadi, H., & Hodijah, S. (2020). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2). <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10328>
- Rumere, Victor;, & Suruan, T. M. (2023). Konsekuensi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 15(02), 279–298. <https://doi.org/10.30862/lensa.v15i02.263>
- Rumere, Victor, Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *Journal of Economics and Policy*, 15(2), 114–138. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301>
- Sausan, A. M., Cahyani, A., Ashidieq, F. N., Risqa, M. A., Bahri, M. S. A., Wahyudi, R., Gitanto, V. R., & Putri, R. F. (2022). Location Quotient Analysis of the Agricultural Sector in Yogyakarta, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Smart and Innovative Agriculture (ICoSIA 2021)*, 19. <https://doi.org/10.2991/absr.k.220305.002>
- Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, 20 (2022).
- Volsi, B., Telles, T. S., Caldarelli, C. E., & da Camara, M. R. G. (2019). The Dynamics of Coffee Production in Brazil. *PLoS ONE*, 14(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219742>
- Yuliansyah, E., Suprihanti, A., Aulia, D., Program, P., Agribisnis, S., Agribisnis, J., & Pertanian, F. (2023). Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Ekspor Cengkeh Antara Indonesia dan Madagaskar di Pasar Dunia. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 24(1).